

Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam Pada Tahun 2016 di Jakarta

Wiradetia Abiyoso¹, Slamet Thohari²

This study discusses the Islamic Defenders Front (FPI) movement in the 2016 Islamic Defending Action in Jakarta. The purpose of this study was to analyze the background and patterns that occurred in the implementation of Islamic Defendant Action carried out by FPI. The Islamic Defendation Action event arose because of a blasphemy case carried out by Basuki Tjahaya Purnama (BTP). The results of this study show that the social movements carried out by FPI are categorized as resource mobilization, political interactive model. In carrying out its action, FPI uses the strength of the internal organization to carry out movements. In addition there are political networks, religious group networks, and networks of interest groups who have participated in assisting FPI. In this action, besides the motive for defending religion, there are hidden economic and political motives. Because behind this movement there is dissatisfaction with the attitude of arrogance from BTP's public policies as the Governor of DKI Jakarta. This was considered detrimental to several parties, including FPI. As a result of this, there has been resentment towards BTP, so that through the momentum of blasphemy, the group affected by the BTP policy joined the FPI and the Muslims in the Islamic Defensive Action. The aim is to intervene in the legal process through a political process so that BTP can be imprisoned.

Keywords: FPI, BTP, Islamic Defending Action, Blasphemy of religion

¹ Wiradetia Abiyoso: Peneliti Lepas, email: wiraabiyoso@gmail.com

² Slamet Thohari: Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya, email: sthohari@ub.ac.id

Pendahuluan

Aksi Bela Islam (ABI) merupakan fenomena gerakan demonstrasi terbesar di Indonesia pasca reformasi 1998. Pasalnya gerakan yang diusung oleh Front Pembela Islam (FPI) ini sudah membangun pandangan bahwa negara telah kalah dengan kekuatan massa. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah baru dalam gerakan kelompok Islam. Sebab pasca reformasi, belum ada gerakan di Indonesia yang mampu menggerakkan jutaan massa untuk melakukan aksi protes di jalan.

Gerakan Aksi Bela Islam tidak dapat lepas dari perselisihan antara FPI dengan Basuki Tjahaya Purnama (BTP). Cara berbicara BTP yang ceplas-ceplos memunculkan ketidaksukaan terhadap BTP, terutama dari kelompok Muslim. Perlawanan FPI terhadap BTP mulai terlihat di tahun 2014. Hal ini karena mereka menolak BTP diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Penolakan terhadap BTP dilandasi oleh sikap karakter BTP yang tidak mencerminkan masyarakat Jakarta yang mayoritas Muslim. FPI menganggap bahwa Jakarta sebagai wilayah mayoritas Islam perlu di pimpin oleh pemimpin dengan karakter muslim.

Bila dicermati, selama kepemimpinan BTP di Jakarta, terdapat kebijakan BTP yang memang merugikan FPI. Kebijakan tersebut diantaranya aturan mengenai penjualan hewan kurban, dan larangan FPI dalam melakukan kegiatan menegakan *amar maruf nahi munkar*. Masalah yang muncul selanjutnya adalah sikap BTP sebagai seorang pemimpin daerah dapat dikategorikan kasar dan berlebihan. Beberapa tindakan dari kebijakan BTP dianggap tidak memanusiakan masyarakat Jakarta, seperti kegiatan penggusuran yang justru memaksa masyarakat pindah secara paksa dari tempat mereka, tanpa menyiapkan tempat baru untuk mereka. Masalah ini yang nantinya akan membawa para korban dari kebijakan BTP melawan balik BTP.

FPI pun menganggap bahwa BTP merupakan pemimpin zalim. Maka wajar pada akhirnya FPI menempuh berbagai jalur hukum untuk menjebloskan BTP ke penjara. Perlawanan FPI terhadap BTP yaitu dengan kampanye dakwah yang dilakukan dari masjid ke mesjid, dan

majelis di Jakarta. Upaya yang dilakukan FPI secara tidak langsung menyudutkan BTP. Sebab BTP merupakan pendatang dan pemeluk agama minoritas. Kondisi tersebut pernah terjadi juga, di mana BTP pernah tidak terpilih menjadi Gubernur Belitung karena kutipan ayat *Al-Quran* tersebut (Tempo, 2017).

Momen ini kemudian membuat BTP menyinggung surat *Al-Maidah* ayat 51 dalam pidatonya pada kunjungannya kerja pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu Jakarta. Berniat untuk mendapatkan simpatik warga, BTP justru dianggap melakukan penistaan agama. Hal ini karena pada pidato BTP tersebut dimaknai bahwa orang yang menyampaikan isi ayat tersebut (Nabi, Ulama, Habib, Ustad) adalah pembohong, dan otomatis surat tersebut adalah bohong karena dibawa oleh Nabi. Klaim bahwa BTP telah melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan menghina kitab suci *Al-Quran* tidak bisa terbantahkan. Hal ini karena ucapan BTP memiliki unsur penodaan agama. Oleh karena itu, FPI meminta aparaturnya untuk memproses hukum BTP. Namun momen ini nyatanya juga dimanfaatkan untuk meminta masyarakat Jakarta agar tidak memilih pemimpin yang menistakan agama. Permintaan ini menjadi kuat karena mendapat legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keluarnya fatwa MUI, mendorong munculnya gerakan yang dilakukan berbagai ormas Islam. Tidak hanya ormas Islam, tetapi partai politik seperti PKS, turut mengambil bagian dalam pelaksanaan gerakan ini. Gerakan ini dilakukan sebanyak tiga kali, 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Menariknya jumlah massa yang hadir dari aksi pertama sampai ketiga meningkat sangat tajam. Bahkan pada aksi ketiga 2 Desember 2016, hampir jutaan umat Islam turun ke jalan bergabung bersama FPI melawan BTP.

Berbagai pendapat melihat bahwa besarnya massa pada aksi ini dikarenakan umat Islam sudah terlalu lama rindu untuk persatuan karena terpecah dari berbagai golongan (kurnia, 2017). Pendapat lain melihat bahwa gerakan ini merupakan momentum kebangkitan populisme Islam di Indonesia (A. M. Mudhoffir, 2017). Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa gerakan ini merupakan gerakan perjuangan kelas dari kelompok yang selama ini tertindas oleh kebijakan BTP (Indoprogress, 2016). Aksi ini juga dianggap mengubah citra FPI sebagai kelompok radikal, menjadi kelompok garis depan pembela Islam (Woodward & Nurish, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana gerakan FPI dalam Aksi Bela Islam pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial, teori mobilisasi sumber daya. sebagai bingkai analisis untuk membantu menemukan interpretasi atas peristiwa Aksi Bela Islam yang terjadi di Jakarta pada tahun 2016 silam. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk melihat latar belakang aksi, serta pola mobilisasi sumber daya dalam gerakan Aksi Bela Islam yang dilakukan oleh FPI. Metode penelitian perlu dijelaskan secara ringkas

Gerakan Sosial

Gerakan sosial dapat dikatakan sebagai upaya aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukkan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (Macionis, 2016). Artinya gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang terstruktur untuk menciptakan atau mempertahankan suatu keadaan baik itu berubah ataupun tetap. Seperti halnya Macionis, Spencer dalam Sukmana (2016:4), menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk menciptakan tatanan kehidupan baru. Proses yang dilakukan oleh FPI dalam melawan BTP di Aksi Bela Islam merupakan bentuk dan model dari gerakan sosial. Hal ini karena adanya orientasi konflik yang terbentuk dari perselisihan antara FPI dan BTP. Perselisihan tersebut tidak dapat terlepas dari sifat dan kebijakan BTP selama memimpin Provinsi DKI Jakarta. Orientasi konflik antara FPI dan BTP memuncak karena kasus penistaan agama. Hal ini lah yang membawa terjadinya Aksi Bela Islam pada tahun 2016 di Jakarta.

Teori Mobilisasi Sumber daya

Teori mobilisasi sumber daya merupakan konsep yang ada dalam gerakan sosial yang menggambarkan sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional (Singh, 2010). Dalam teori mobilisasi sumber daya dijelaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat terjadi suatu ketidakpuasan, maka cukup untuk memungkinkan terjadinya sebuah gerakan (Oberschall, 2016) (Konsistensi penulisan sumber rujukan perlu diperhatikan). Pichardo (2016:157) melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumber daya yakni, sumber daya, motivasi dan lingkungan politik. Namun, Oberschall (2016:155) menjelaskan juga bahwa pada dasarnya dua

poin penting yang mempengaruhi gerakan sosial adalah adanya faktor aktor yang menjadi pemimpin dan juga organisasi yang menjalankan gerakan sosial.

Metode

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang datanya diperoleh langsung dilapangan, dan bukan dari laboratorium penelitian yang terkontrol (Salim, 2006). Pada konteks gerakan FPI dalam Aksi Bela Islam, penggunaan model kualitatif untuk mendapatkan informasi, serta data tertulis dari hasil pengamatan dan lisan dari para narasumber yang memiliki peran pada gerakan ini. Sementara pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan studi kasus karena pertanyaan penelitian ini yaitu *how* dan dalam penelitian ini kesempatan peneliti untuk mengontrol proses peristiwa sangat sedikit sehingga model pendekatan studi kasus merupakan pendekatan paling tepat untuk penelitian ini. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hal tersebut kriteria informan dalam penelitian ini adalah: 1, Anggota FPI yang menduduki struktur dalam GNPF MUI. 2, Mengikuti Aksi Bela Islam. 3, Memahami permasalahan FPI dan BTP. 4, Berperan dalam pelaksanaan Aksi Bela Islam.

Gerakan FPI dalam Aksi Bela Islam (ABI)

Konflik antara FPI dan BTP

Gerakan yang dilakukan oleh FPI merupakan bagian dari bentuk gerakan sosial. Pada konteks FPI, gerakan Aksi Bela Islam tidak terjadi begitu saja. Proses penistaan agama yang dilakukan oleh BTP berawal dari rentetan panjang narasi konflik kebencian antara FPI dengan BTP. Rentetan konflik tersebut memuncak sampai pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP, sehingga memunculkan gerakan perlawanan yang dinamakan sebagai Aksi Bela Islam. Perselisihan antara FPI dan BTP sudah mulai terjadi sejak tahun 2012. FPI secara terbuka menolak BTP membawahi tanggung jawab dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan umat Islam di Jakarta. Namun, FPI dalam konteks ini memberikan solusi yaitu, meminta BTP berpindah agama, atau meminta Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo untuk mengganti

tanggung jawab BTP mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan umat Islam ke hal yang lain seperti masalah anggaran atau masalah percepatan pembangunan.

Tetapi sikap BTP yang arogan dan suka berkata kasar, nyatanya membuat FPI memandang BTP secara negatif. BTP yang beragama Nasrani, dan keturunan etnis Tionghoa dianggap tidak pantas untuk memimpin ibukota Jakarta. Maka dari itu di tahun 2014, FPI menolak apabila BTP menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi lumrah, karena BTP gagal untuk melakukan pendekatan secara baik dengan ormas lokal, apalagi BTP merupakan pendatang dan kaum minoritas. Pada prosesnya, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, BTP dijadikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Selama menjadi plt, BTP mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan FPI. Kebijakan yang merugikan FPI adalah dengan mengeluarkan peraturan tentang larangan pelaksanaan takbir keliling. Namun hal ini tidak digubris oleh FPI, karena takbir keliling sudah menjadi budaya tidak hanya FPI, namun beberapa umat Islam di Jakarta.

Kebijakan BTP yang merugikan lainnya adalah membuat peraturan larangan menjual dan menyembelih hewan kurban di sembarang tempat. Kebijakan ini dapat dikatakan merugikan FPI, karena ormas Islam tersebut merupakan salah satu kelompok yang berperan dalam melakukan jual beli dan penyembelihan hewan kurban di Jakarta. Berjalannya kebijakan ini tentu dapat menimbulkan kerugian materiil, terutama pada kelompok yang berperan dalam jual beli dan penyembelihan hewan kurban. Hal ini menjadi salah satu dasar mulai meruncingnya hubungan antara FPI dengan BTP. Sebab BTP gagal menghadirkan kelompok-kelompok berkepentingan untuk memberikan solusi secara konkret, sehingga yang terjadi adalah perlawanan terhadap kebijakan.

Pada tahun 2014, istilah Betawi "*lo jual, gue beli*" menjadi nyata dalam kisruh antara FPI dan BTP. FPI yang frontal, dan BTP yang arogan saling menyerang satu sama lain. Pada akhirnya hal ini membuat kondisi politik di Jakarta menjadi memanas. BTP menantang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) untuk membubarkan FPI karena ormas ini dianggap meresahkan masyarakat. Namun sayangnya, FPI tidak tercatat sebagai organisasi resmi di bawah kemendagri. Melalui dasar ini, BTP merasa bahwa FPI merupakan ormas ilegal,

dan meminta pihak kepolisian untuk melarang segala bentuk kegiatannya FPI di Jakarta termaksud *sweeping* penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Polemik antara FPI dan BTP berlanjut di September 2014. FPI melakukan protes ke DPRD DKI Jakarta untuk meninjau ulang pengangkatan BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Melalui anggota DPRD DKI Jakarta AL FPI diberikan kesempatan untuk menyampaikan protes mereka. Namun hal ini tidak memberikan hasil karena BTP tetap akan menjadi Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan amanat konstitusi. BTP diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada pertengahan November 2014. Sebagai bagian dari penolakan, FPI turun melakukan demonstrasi sebagai wujud protes dilantikannya BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya itu, FPI juga membuat Gubernur tandingan dan menganggap BTP tidak sah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tindakan yang dilakukan FPI cenderung ke-Islaman, karena FPI justru membuat gadung dengan membuat gubernur tandingan.

Pasca dilantikannya BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta, kebijakan BTP untuk normalisasi kali Ciliwung, Kampung Pulo, Pluit, Kalijodo dan perkampungan kumuh, memunculkan agenda pengusuran di tempat tersebut. Berbeda dengan pendekatan Joko Widodo dalam pengusuran yang mengutamakan kesiapan warga untuk pindah, BTP cenderung langsung melakukan tindakan keras melalui proses pengusiran. Upaya ini diprotes keras oleh berbagai kalangan termaksud FPI, terlebih ada beberapa wilayah massa FPI yang rumahnya menjadi korban pengusuran. Karena hal ini, FPI melaporkan BTP ke Bareskrim Polri atas pelanggaran HAM. Namun laporan FPI tidak dapat ditindak lanjut, karena tindakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berlandaskan hukum, dan wilayah yang digusur merupakan pemukiman ilegal.

Kebijakan BTP yang memicu kemarahan FPI lainnya adalah larangan kegiatan *tablig* akbar di Monas pada awal 2015. BTP menyatakan bahwa Monas tidak diizinkan untuk kegiatan keagamaan. Namun tiga bulan pasca kebijakan itu, BTP mengizinkan kegiatan perayaan paskah di Monas. Hal ini membuat BTP semakin dibenci oleh FPI, isu agama menjadi pandangan FPI yang menilai bahwa bila Gubernur Nasrani memimpin mayoritas umat Islam, maka kegiatan agama akan semakin sering dilarang, terlebih pelarangan kurban menjadi awal dari kebijakan BTP yang menyentuh persoalan agama.

Kontroversi BTP yang sangat ditentang oleh FPI di tahun 2015 adalah wacana lokalisasi prostitusi di Jakarta. BTP merasa bahwa prostitusi di Jakarta perlu dipusatkan dalam satu tempat supaya tidak menyebar. Namun FPI menilai bahwa prostitusi merupakan kegiatan haram karena melanggar norma agama dan akan menimbulkan malapetaka bila dilegalkan. Akhirnya wacana ini batal karena menuai kontra dari banyak pihak terutama pemuka agama dan tokoh masyarakat Betawi. Kebijakan BTP bagi FPI tidak mencerminkan ke-Islaman. Hal ini yang membuat FPI melakukan gerakan dengan kegiatan pengajian di seluruh wilayah Jabodetabek. Pengajian ini untuk mengingatkan umat Islam di Jabodetabek tentang larangan mengangkat dan memilih pemimpin non-Islam sebagai pemimpin. Upaya ini sekaligus untuk membuat BTP terjebak dalam isu agama. Pengajian ini dilakukan hampir di setiap akhir pekan di majelis taklim di seluruh Jabodetabek. FPI membawa perintah surat *At-Taubah* ayat 23 dan *Al-Maidah* ayat 51 sebagai dalil kebenaran untuk melegitimasi pengajian mereka.

Jalannya pengajian rutin untuk mengingatkan umat Islam di Jabodetabek tentang larangan memilih pemimpin non-Islam, dibarangi dengan tindakan lainnya. Salah satunya dengan mengadakan konvensi calon Gubernur DKI Jakarta melalui Majelis Jakarta Bersyariah. Bekerja sama dengan Partai keadilan Sejahtera (PKS), FPI mengumpulkan ulama dan tokoh masyarakat Betawi untuk mencari penantang BTP dalam kontes pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pada konvensi tersebut memunculkan lima nama yang direkomendasikan, di mana salah satunya adalah Sandiaga Salahudin Uno kandidat lawan politik BTP dalam pilkada 2017.

Pada pertengahan tahun 2016, FPI melaporkan BTP kembali ke KPK. Penyebabnya adalah menindaklanjuti hasil temuan BPK yang menyatakan ada ketidakwajaran dari proses pelaksanaan jual beli lahan RS Sumber Waras. Kedatangan FPI ke KPK dilakukan bersama MUI. Namun FPI merasa bahwa KPK melindungi BTP sehingga FPI tidak diterima KPK. Masalah ini menjadi bahan pengajian FPI yang menilai bahwa kezaliman yang dilakukan BTP sudah dilakukan secara struktural, sehingga BTP kebal terhadap penegakan hukum.

Tabel 1 Tindakan BTP yang ditentang FPI

2014	2015	2016
------	------	------

Larangan Takbir Keliling	Pelarangan penggunaan Monas dalam kegiatan agama (tablig akbar)	Pengurangan dana ormas (tidak berpengaruh karena FPI tidak terdaftar sebagai penerima dana ormas)
Perda aturan jual beli hewan kurban	Perda pemotongan hewan kurban sembarangan	Dugaan Korupsi RS. Sumber Waras
Permintaan Pembubaran FPI	Pelanggaran HAM terhadap warga Kampung Pulo dan Bukitduri yang digusur	Dugaan Korupsi Transjakarta
Larangan kegiatan FPI di Jakarta	Usulan melegalkan lokalisasi prostitusi	Penistaan Agama

Sumber: diolah oleh peneliti

Kesalahan BTP pada konteks ini adalah sebagai pendatang, BTP tidak menunjukkan itikad baik untuk menunjukkan kompromi dengan kelompok masyarakat di Jakarta, khususnya FPI. Terlebih dalam beberapa kebijakan, BTP cenderung bertindak terburu-buru tanpa memberikan ruang diskusi dengan kelompok masyarakat terkait, berbeda dengan pendekatan dari Joko Widodo saat masih menjadi gubernur. Hal ini lah yang menjadi penyebab dari munculnya perlawanan dan kebencian terhadap BTP. Sebab tindakan dari BTP berakibat merugikan secara ekonomi, politik dan kultur dari kebiasaan masyarakat Jakarta.

Penistaan agama dan Aksi Bela Islam

Puncak konflik antara FPI dan BTP adalah dengan munculnya kasus penistaan agama. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP terjadi dalam kunjungan kerja Gubernur Jakarta di Kepulauan Seribu. Pada momen tersebut, terdapat pidato dari BTP yang ternyata merujuk kepada penghinaan terhadap surat *Al-Maidah* ayat 51. BTP mengucapkan kata

“dibohongi (pakai) surat *Al-Maidah* 51 macam-macam itu”. Makna kata “dibohongi pakai” bagi FPI memberikan indikasi bahwa siapa pun yang menggunakan (menyebarkan, menyampaikan) surat *Al-Maidah* 51 merupakan pembohong, maka pengantarnya baik itu Nabi, Habaib dan Ulama merupakan pembohong, ini artinya surat *Al Maidah* 51 tersebut berisi kebohongan karena diantarkan oleh Muhammad SAW.

Pernyataan FPI bahwa pidato dari BTP merupakan bentuk penistaan agama diperkuat dengan adanya fatwa MUI. Tetapi fatwa MUI tersebut muncul karena desakan dari FPI. Sebab muncul kegaduhan akibat pro kontra mengenai persepsi kelompok Islam tentang ucapan BTP tersebut. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ucapan BTP bukanlah merupakan penistaan agama tetapi pembelaan diri. Namun pendapat FPI, ucapan BTP merupakan penistaan agama, karena telah menyatakan siapapun yang menyampaikan isi surat *Al-Maidah* ayat 51 baik itu Nabi, Ulama, Habaib dan Ustad merupakan pembohong, dan kandungan isi surat tersebut adalah bohong karena dibawa oleh Nabi.

Ketua MUI saat itu K.H Ma’ruf Amin juga mengakui bahwa fatwa terhadap BTP merupakan desakan dari kelompok Islam (Liputan6, 2017). Munculnya fatwa MUI ini membuat BTP tidak hanya melawan FPI, tetapi melawan berbagai ormas Islam termaksud di dalamnya umat Islam. Kasus penistaan agama juga dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan BTP seperti korban penggusuran di Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Melayu, Kalijodo, pedagang pasar Tanah Abang, pendukung Persija Jakarta (Jak Mania) untuk melawannya. Momen pilkada Jakarta 2017 juga dimanfaatkan betul oleh lawan politik dari BTP. Hal ini karena masalah ini sangat menguntungkan untuk menggerus *elektabilitas* BTP sebagai calon kuat pemenang Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Maka bukan menjadi hal aneh jika dibalik gerakan keagamaan, banyak kepentingan yang muncul dari gerakan ini.

Pasca munculnya fatwa dari MUI, FPI membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Bentuk aksi yang dilakukan GNPF MUI adalah dengan mengadakan demonstrasi besar. Demonstrasi besar ini akan dikenal dengan istilah angka 14 Oktober 2016 (1410), 4 November 2016 (411), dan 2 Desember 2016 (212). Tujuannya adalah menekan Negara supaya mengizinkan penegak hukum segera memproses kasus BTP. Hal ini

dilakukan karena FPI berasumsi jika BTP dilindungi oleh penguasa dan pengusaha. Sehingga penegak hukum tidak berani untuk mengambil tindakan terhadap berbagai macam kasus hukum BTP yang dilaporkan oleh FPI .

Aksi pertama GNPf MUI adalah gerakan 1410. Hampir 20.000 ribu masa dari FPI, FUI, GPII, KB-PfI, Majelis Az-Zikra, AQL Center, Hamas Tenabang, FBR, FORKABI, FKAAI, JAS, Taruna Muslim, Hidayatullah, PfI dan GBN ikut serta dalam gerakan tersebut. Walaupun kelompok-kelompok tersebut merupakan gabungan kelompok Islam dan ormas lokal Jakarta, tetapi besarnya jumlah massa menjadi perhatian bagi aparat keamanan. Bahkan ada upaya massa untuk membunuh BTP jika penegak hukum tidak segera melakukan tindakan. Tetapi karena adanya jaminan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Iriawan untuk segera memproses kasus BTP, upaya itu tidak dilakukan.

Aksi kedua dilakukan pada 4 November 2016 atau dikenal dengan 411. FPI bergerak bersama berbagai ormas Islam, yang jauh lebih besar jumlahnya dari aksi 1410. Tidak hanya itu, aksi ini pun di ikuti oleh Ulama yang juga merupakan publik figur seperti Aa Gym bersama Pondok Pesantrennya, K.H Arifin Ilham bersama Pondok Pesantrennya, AM Fatwa dengan Yayasan Asrama Pelajar Islam), Syekh Ali Jaber, Yusuf Mansur, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefudin, Mardani Ali, Fahri Hamzah, Yusril Ihza Mahendra, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan masih banyak Ulama besar dan Habaib ikut dalam gerakan ini. Gerakan 411 dapat dikatakan sebagai titik awal besarnya gerakan ini, karena ada ratusan ribu orang dalam gerakan ini. Bahkan FPI mengklaim gerakan ini mencapai 2 juta orang. Tujuan dari gerakan ini adalah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengizinkan penegak hukum untuk memeriksa BTP dalam kasus penistaan agama. Hal ini karena BTP dianggap dilindungi Presiden, karena dia diusung oleh partai yang mendukung Presiden Joko Widodo.

Absennya Presiden Joko Widodo untuk menemui massa, membuat massa bertahan di depan Istana sampai melebihi batas waktu yang diizinkan. Namun gerakan ini dinodai oleh serangkaian kericuhan akibat kemarahan massa kepada aparat yang melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air mata kepada massa untuk membuat massa bubar. Akibat dari hal tersebut banyak Ulama, Habaib yang terluka. Kerusuhan yang terjadi pada 411

merupakan peringatan terhadap Negara dan penegak hukum. Hal ini karena besarnya massa bisa berakibat kepada kerusuhan yang lebih besar yang dapat mengganggu ketidakstabilan politik dan keamanan Negara jika penegak hukum tidak bertindak cepat menangani kasus ini.

Anti klimaks dari rangkaian aksi ini adalah aksi super damai 212. Aksi ini diikuti berbagai kelompok Islam dan berbagai golongan masyarakat. FPI mengklaim 7 juta orang ikut dalam 212. melihat jumlah massa yang begitu besar, membuat kepolisian dan TNI berupaya meyakinkan umat Islam bahwa BTP akan segera ditangkap. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang langsung berorasi di depan demonstran bahwa hanya Polri yang berhasil menjadikan BTP menjadi tersangka.

Berdasarkan hal tersebut, konflik yang terjadi antara dua kubu memang dilandasi kebencian akibat sikap, dan kebijakan BTP yang merugikan FPI. Terlebih terdapat permasalahan ekonomi dan akidah yang menjadi perhatian FPI pada masa kepemimpinan BTP. Munculnya penistaan agama menjadi puncak dari konflik antara FPI dan BTP. Permasalahan penistaan agama ini pada akhirnya memunculkan jaringan solidaritas yang terbentuk atas kesamaan identitas. Melalui proses tersebut muncul gerakan untuk melawan BTP. Tujuan dari gerakan ini yaitu untuk memaksa penegak hukum segera memproses BTP, dan meminta masyarakat Jakarta yang beragama Muslim untuk tidak memilih BTP sebagai Gubernur dalam pilkada 2017.

Pola mobilisasi sumber daya yang dilakukan FPI dalam Aksi Bela Islam

Mobilisasi sumber daya yang terjadi pada konteks FPI merupakan bentuk kekecewaan dengan diangkatnya BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini karena kebijakan BTP selama ini dianggap merugikan banyak kelompok, termasuk diantaranya FPI. Terjadinya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP memperkuat alasan FPI untuk melawan BTP. Kondisi sistem politik di Indonesia memungkinkan untuk terciptanya gerakan demonstrasi maupun aksi protes. Hal tersebut dilindungi oleh undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum. FPI memanfaatkan celah tersebut yang dianggap sangat lemah terutama pada gerakan massa. Maka dari itu FPI menggunakan mobilisasi massa yang begitu besar sebagai langkah dan upaya untuk mengalahkan BTP. Namun, untuk melihat pola mobilisasi massa, dibutuhkan kerangka konseptual untuk melihat proses terjadinya gerakan

tersebut. Oberschall dan Pichardo dalam (Sukmana, 2016), menjelaskan bahwa untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah adanya organisasi gerakan sosial, adanya kepemimpinan, adanya jaringan, adanya sumber daya, motivasi dan kondisi lingkungan politik.

Organisasi Gerakan Sosial

Pada aksi yang dilakukan oleh FPI, organisasi gerakan sosial adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Upaya ini dilakukan untuk menggabungkan kelompok-kelompok Islam di luar FPI untuk bekerja sama dalam melawan BTP. Walaupun aksi ini dinaungi oleh GNPF MUI, tetapi pada pelaksanaan gerakan ini, seluruh sayap organisasi FPI bergerak berdasarkan fungsi masing-masing. Hal ini untuk membuat gerakan yang dilakukan FPI dapat terorganisir dengan baik, karena sudah tercipta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sayap FPI dalam melaksanakan gerakan. Berikut merupakan pembagian tugas dari organisasi sayap FPI.

- a) Laskar Pembela Islam (LPI) bertugas sebagai tim pengamanan dalam pelaksanaan aksi, bekerja sama dengan pihak kepolisian. LPI tidak hanya bertugas untuk mengamankan, tetapi juga mengawal ulama, ustad dan tokoh-tokoh penting pada aksi ini. Komando dari LPI adalah Ustad Maman yang merupakan ketua LPI sekaligus koordinator lapangan GNPF MUI.
- b) Hilal Merah yaitu tim kesehatan FPI bertugas bekerja sama dengan pihak-pihak PMI dan kesehatan untuk memberikan fasilitas kesehatan terhadap para demonstran yang sakit.
- c) Front TV bekerja sama dengan Al-Barjah TV dan VOA Islam untuk meliput pelaksanaan gerakan.
- d) Mujahid Pembela Islam yang bertugas untuk memberikan bantuan logistik berupa makanan kepada peserta aksi.
- e) Badan Hukum Front (BHF) bertugas untuk menjadi kuasa hukum dalam proses hukum dari BTP yang di dalamnya terdapat Sekjen FPI Munarman.

- f) Kesekretariatan FPI di bawah komando Munarman juga membawahi tugas dari “S” sebagai bagian dari tim *buzzer* yang memproduksi foto ataupun poster mengenai ajakan aksi, maupun tentang konten mengenai BTP.
- g) Tim Jihad dan Bela Negara yang dipimpin oleh “AQ” bertugas untuk memberikan penyampaian ceramah dan dakwah di berbagai tempat tidak hanya di Jakarta namun di berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten, sebagai upaya mengajak umat Islam untuk bergabung mengikuti gerakan.

Pemimpin Aksi Bela Islam

Dalam Aksi Bela Islam, ketua dari organisasi gerakan sosial GNPf MUI merupakan Ustad Bachtiar Natsir (UBN). Tetapi faktanya terdapat K.H Maruf Amin (MA) dan HRS yang memiliki posisi sentral di atas UBN, yaitu sebagai pembina gerakan. MA memiliki peran dominan untuk mengajak umat Islam melalui fatwa MUI untuk bergabung membela Islam yang kitab sucinya dinistakan oleh BTP. Namun demikian HRS jauh lebih populer dibandingkan MA dalam Aksi Bela Islam. Hal ini karena HRS yang paling vokal dalam melawan BTP. Posisi HRS sebagai pemimpin memang sangat jelas terlihat. Apabila dirunut lebih jauh, HRS bersama FPI sudah melawan BTP ketika BTP diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. HRS berperan dominan dalam memprotes BTP ke DPRD DKI Jakarta, melaporkan BTP ke Bareskrim Polri, melaporkan BTP ke KPK, mengadakan konvensi calon Gubernur DKI Jakarta dan upaya untuk menjebloskan BTP ke penjara. Salah satu peran yang paling kontroversi pada kasus BTP adalah dengan dijadikannya HRS menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP.

Jaringan FPI dalam Aksi Bela Islam

Terdapat jaringan yang membantu FPI untuk melawan BTP. Hal ini karena gerakan sosial merupakan bentuk kolektif untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi sosial. Maka dari hal tersebut dibutuhkan jejaring kolektif untuk memperkuat jalannya gerakan. Semakin besar jaringan massa yang ikut dalam gerakan, semakin besar pula kemungkinan gerakan sosial dapat berhasil mempengaruhi posisi politik (Oberschall, 2016). Sebagai organisasi yang pertama kali mencetuskan Aksi Bela Islam, FPI bekerja sama dengan jaringan aktor ataupun kelompok untuk

membantu pelaksanaan Aksi Bela Islam dalam menuntut agar BTP dijebloskan ke penjara. Berikut merupakan jaringan penting yang bergabung dengan FPI dalam Aksi Bela Islam:

Pertama, jaringan FPI pada Aksi Bela Islam pertama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aktor yang berperan adalah MA. Sudah bukan rahasia umum bila MUI menjadi salah satu jaringan FPI yang memiliki peran besar pada gerakan FPI dari sebelum demonstrasi penistaan agama. Secara konkret peran MUI dan MA yaitu mengeluarkan dalil fatwa terhadap BTP. Fatwa yang pertama kali ditandatangani oleh MA melalui MUI yaitu larangan memilih pemimpin non-Islam menjadi pemimpin di kalangan umat Islam. Fatwa ini muncul sebelum kasus penistaan agama bergulir. Kedua, adalah fatwa tentang penista agama dan penekanan umat Islam tentang perintah larangan memilih pemimpin non-Islam. Berdirinya fatwa MUI juga karena adanya fatwa MUI. Walaupun MUI secara tegas tidak mendirikan GNPf MUI, tetapi MUI mendukung keberadaan GNPf MUI. Hal ini dibuktikan dari kehadiran tokoh-tokoh dari MUI seperti ketua MUI, sekjen MUI pada gelaran demonstrasi besar untuk melawan penista agama. Kehadiran MUI merupakan bagian dari upaya agar FPI tidak main hakim sendiri terhadap BTP. Hal ini karena FPI menghalalkan upaya membunuh penista agama. Selain itu fatwa yang diterbitkan MUI dirasa cukup berlebihan. Sebab konteks fatwa nomor 1 dan 2 mengenai wajib umat Islam mengikuti perintah *Al-Quran* dirasa berlebihan dan di luar konteks penistaan agama.

Kedua, jaringan FPI yang memiliki andil besar membantu FPI dalam menjalankan Aksi Bela Islam adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui para elitnya PKS mendukung FPI untuk melakukan demonstrasi untuk menuntut proses hukum terhadap BTP. Padahal antara FPI dan PKS memiliki pandangan mengenai Islam yang berbeda. Namun pada proses politik, PKS justru sangat mendukung tindakan yang dilakukan FPI dalam melawan BTP. Kepentingan politik menjadi kuat dalam proses hubungan FPI dan PKS, mengingat gerakan yang dijalankan FPI bersama PKS lebih ke arah politik. Hal ini dapat dilihat dari adanya Majelis Jakarta Bersyariah yang tujuannya menjaring Gubernur muslim untuk menantang BTP di pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam demonstrasi besar melawan BTP, PKS juga menghimbau seluruh kadernya untuk bergabung bersama FPI, termaksud memberikan himbauan membantu FPI secara ikhlas baik materiil maupun non-materiil.

Ketiga, Ustad Bachtiar Natsir (UBN). Beliau merupakan seorang pendakwah. Namanya mencuat karena menjadi ketua GNPf MUI dalam pelaksanaan aksi 1410, 411 dan 212. UBN memiliki posisi di bawah HRS pada gelaran GNPf dan menjadi bagian penting karena menjadi ujung tombak dalam negosiasi mengenai kasus BTP kepada kepolisian maupun ke negara. Pada 411 UBN yang mewakili GNPf MUI menemui perwakilan negara dalam membicarakan kasus BTP.

Keempat, AL. Nama AL sangatlah populer sejak BTP menjadi pelaksana tugas sekaligus Gubernur DKI Jakarta. Hal ini karena BTP dan AL sangat sering berkonflik. Termaksud pada kasus mengenai pengadaan UPS di DKI Jakarta. AL terkenal sebagai penguasa daerah pasar Tanah Abang. AL merupakan salah satu aktor sentral yang sangat jarang terlihat. Pasalnya dia menjadi aktor yang paling banyak membantu FPI dalam melawan BTP. Alasan AL membantu FPI karena sebagai penguasa Tanah Abang, kebijakan BTP kepada kelompok yang berada di Tanah Abang sangat merugikannya. Ini lah mengapa AL sangat militan membantu FPI.

Pada masa kepemimpinan BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta, wilayah Tanah Abang menjadi wilayah yang dibereskan (digusur dan dipindahkan) oleh BTP. Hal ini karena keberadaan para pedagang Tanah Abang mengganggu ketertiban lalu lintas. Ketika FPI menolak BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta, AL yang memberikan ruang kepada FPI di DPRD DKI Jakarta untuk melakukan protes. Walaupun tidak berhasil menghentikan BTP untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun AL berperan untuk membantu baik materiil dan non materiil kepada FPI, terutama dalam melakukan pengajian politik yang didalamnya melarang memilih pemimpin non-Islam. AL bersama FPI juga membentuk Hamas Tenabang yang gunanya untuk membangun komunikasi antar jaringan masjid di wilayah Petamburan dan Tanah Abang. Peran AL lainnya untuk menyatukan ormas lokal Betawi seperti FBR, Forkabi dan Jawara Betawi untuk mengawal dan mendukung FPI dalam melawan BTP sejak diangkatnya BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan dalam demonstrasi melawan BTP.

Kelima, Forum Umat Islam (FUI) dengan aktor AK. FUI merupakan gabungan dari beberapa kelompok Islam. FPI menjadi salah satu ormas yang ikut berada di FUI. FUI berperan untuk mengajak ormas Islam dan majelis lainnya yang berada di Jakarta untuk melawan BTP

pada 411. Sementara AK merupakan mantan ketua HTI, sekaligus sebagai Sekjen FUI. Walaupun nama AK tidak sebesar nama HRS, UBN dan MA dalam Aksi Bela Islam, tetapi pasca aksi 212, AK sangat berperan bersama FUI melanjutkan Aksi Bela Islam dengan tujuan melawan UU ormas dan kriminalisasi ulama. AK juga berperan membentuk GNPf Ulama dan PA 212 pasca selesainya tuntutan terhadap BTP.

Sumber Daya Gerakan Aksi Bela Islam

Sumber daya merupakan salah satu bagian unsur penting dari berlangsungnya suatu gerakan. Pasalnya sumber daya menjadi patokan dari seberapa kuat suatu gerakan dapat berlangsung. Berikut merupakan sumber daya dari gerakan Aksi Bela Islam.

Pertama, sumber daya moral merupakan bentuk legitimasi yang dibangun melalui dukungan solidaritas, dukungan simpati dan dukungan tokoh terkenal. Munculnya publik figur dalam pelaksanaan Aksi Bela Islam yang dilakukan oleh FPI memberikan keyakinan dan motivasi untuk masyarakat secara umum bergabung dengan FPI dalam Aksi Bela Islam. Tokoh-tokoh yang hadir seperti Aa Gym, K.H Arifin Ilham, Ustad Zaki Mirza, Ustad Alfian Tandjung, Amien Rais, AM Fatwa, Tengku Zulkarnain, Ratna Sarumpaet, Syekh Ali Jaber, Yusuf Mansur, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefudin, Mardani Ali, Fahri Hamzah, Eko Patrio, Yusril Ihza Mahendra, Fadli Zon, Ahmad Dhani, Ali Mochtar Ngabalin, Tuan Guru Bajang, Zumi Zola dan publik figur lainnya. Kehadiran dan eberadaan publik figur nyatanya mampu untuk memberikan keyakinan secara moral untuk masyarakat ikut dalam aksi yang dilakukan oleh FPI.

Hadirnya tokoh-tokoh besar dalam aksi ini memberikan legitimasi kepada FPI untuk meyakini potensi sumber daya manusia yang terpengaruh karena ketokohan. Keyakinan mengenai aksi ini yang akan berjalan damai semakin kuat karena didukung oleh pihak kepolisian dan militer. Hal ini dimanfaatkan dengan menyebarkan poster-poster mengenai aksi damai 212, di mana terdapat Kapolri, Panglima TNI dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang mendukung jalannya gerakan tersebut. FPI juga mengajak penegak hukum TNI-Polri bahkan institusi pemerintahan untuk bergabung bersama FPI dan GNPf MUI untuk menghadiri aksi damai 212. Dengan demikian, keyakinan bahwa aksi ini akan berlangsung damai menjadi semakin kuat. Apalagi faktanya aksi ini diikuti oleh Menkopolkam Wiranto, Presiden Joko Widodo, Wakil

Presiden Jusuf Kalla. Maka dari hal tersebut, aksi ini semakin memperlihatkan bahwa aksi ini merupakan upaya aksi damai, yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan kepada negara mengenai kekuatan dari umat Islam Indonesia.

Kedua, sumber daya organisasi sosial yaitu sumber daya yang didapat dari organisasi gerakan maupun organisasi yang tidak memiliki tujuan gerakan. Aksi Bela Islam dihadiri oleh besarnya masyarakat yang ikut karena tidak lepas dari ikut sertanya organisasi sosial yang hadir. Organisasi sosial yang ikut hadir dalam Aksi Bela Islam di antaranya FUI, GPII, KB-PII, Majelis Az-Zikra, Majelis Darul Tauhid, AQL Center, Hamas Tenabang, PKS, Organisasi Sayap Gerindra, FBR, FORKABI, FKAAL, JAS, HTI, Taruna Muslim, Hidayatullah, PII, GBN, KAMMI, HMI, Persis dan masih ada organisasi masyarakat serta pesantren, majelis taklim yang bergabung baik lokal maupun skala nasional yang ikut hadir. Keberadaan organisasi sosial yang ikut bergabung dalam gerakan ini, sangat membantu menambah jumlah massa yang hadir untuk bergerak bersama FPI melakukan Aksi Bela Islam.

Ketiga, adalah Sumber Daya Manusia, pada proses ini sumber daya manusia yang ada dalam gerakan ini tidak dapat lepas dari partisipasi individu yang didasari pada motivasi. Hal-hal tersebut dilatarbelakangi pertama karena adanya motivasi membela agama yang telah dinistakan oleh BTP. Kedua, hadirnya publik figur terutama para ulama. Ketiga, adalah motivasi karena organisasi, kehadiran organisasi yang ikut bergabung bersama FPI untuk melakukan aksi, membuat komitmen dari anggota organisasi untuk turut serta menjadi bagian mengikuti gerakan. Lalu keempat adalah kesamaan kepentingan politik, hal ini terjalin karena adanya motif politik dari gerakan ini untuk mengalahkan BTP dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini yang menyebabkan ada kelompok-kelompok politik yang ikut serta untuk mengikuti gerakan ini. Namun motivasi yang paling besar adalah motivasi membela agama dan mengalahkan BTP dalam proses politik.

Keempat, sumber daya materiil. Pada pelaksanaan gerakan, dibutuhkan sumber daya materiil sebagai alat bantu untuk operasional gerakan. Sumber daya materiil seperti uang pada gerakan ini hadir dari sumbangan umat Islam. Sumbangan umat Islam dalam hal ini merupakan sumbangan individu, kelompok Islam dan partai politik. terkhusus partai politik, sumber daya

dana yang diberikan masuk melalui individu. Hal ini karena momen tersebut bertepatan dengan kontestasi pilkada, sehingga akan ada dampak hukum apabila partai politik menyokong dana untuk gerakan di luar kampanye.

Salah satu partai Islam disinyalir menjadi partai politik yang secara individu sukarela untuk memberikan bantuan materiil berupa uang ataupun moril berupa partisipasi dalam gerakan. Partai tersebut sudah sejak awal sangat banyak membantu FPI dalam gerakan ini. Sementara disinyalir terdapat sumbangan dari AL. Sumbangan dalam hal ini adalah bantuan berupa izin dan memfasilitasi pengajian FPI di Tanah Abang. Informasi mengenai jumlah dana yang masuk dan dari mana saja menjadi hal yang sulit untuk didapatkan. Sebab FPI melalui GNPF MUI, membuka rekening umat, di mana setiap orang ataupun individu diperkenankan untuk memberikan sumbangan berupa uang. Bahkan FPI sebagai pihak yang menjalankan aksi sampai tidak dapat mengetahui siapa saja yang memberikan sumbangan. Sebab jumlah yang menjadi donatur gerakan ini sampai ribuan orang.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa FPI diuntungkan sangat besar pada kasus penistaan agama. Hal ini karena munculnya gerakan ini membuat FPI mendapatkan sumber daya hampir secara gratis dan cuma-cuma, karena FPI mendapat bantuan dari umat Islam baik materiil dan non Materiil. di samping itu sumber daya manusia yang hadir pun tidak perlu untuk dibayar oleh FPI, karena bila melihat jumlah massa yang hadir, maka dibutuhkan dana lebih dari ratusan miliar untuk mengadakan gerakan tersebut.

Kesimpulan

Merefleksikan hasil interpretasi tentang gerakan FPI dalam Aksi Bela Islam pada tahun 2016, perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini tidak murni sebagai bentuk membela agama. Orientasi konflik yang muncul antara FPI dan BTP tidak hanya karena penistaan agama, namun lebih karena ketidaksukaan FPI terhadap BTP. Ketidaksukaan ini muncul akibat sikap dan kebijakan BTP yang kasar sejak diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini wajar karena BTP melarang berbagai kegiatan FPI dalam keagamaan, termaksud dalam kegiatan ekonomi seperti melakukan penjualan hewan kurban.

Berangkat dari hal tersebut, dibutuhkan pembuktian bahwa gerakan ini tidak murni untuk membela agama, adalah Pertama, pada kasus puisi Sukmawati pada 2018 silam. Walaupun dianggap penistaan agama, namun tidak ada gerakan besar yang masif seperti melawan BTP. Bahkan permintaan maaf Sukmawati diterima dan tanpa ada upaya hukum di sana. Kedua, kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser. Tidak ada upaya aksi yang secara masif untuk protes. Bahkan tidak ada protes lebih dari FPI, padahal pembakar bendera tauhid tersebut hanya di kurung penjara 3 hari dan denda uang Rp. 7.000,- saja.

Selain karena faktor kebencian akibat kebijakan BTP yang merugikan FPI, terdapat motif politik dalam gerakan tersebut. Momentum Aksi Bela Islam sangat dekat dengan kegiatan pilkada tahun 2017. Bila melihat Aksi Bela Islam III, yang dekat dengan momen pilkada 2017, aksi tersebut dihadiri jutaan orang. Sementara reuni 212 pada tahun 2017, di mana tidak ada momen politik, massa yang hadir bahkan tidak memenuhi Monas. Namun dalam reuni 212 pada tahun 2018 yang dekat dengan pemilu dan pilpres 2019, reuni tersebut bahkan hampir menyamai aksi 212. Penjelasan ini memberikan arti bahwa, ada kaitan antara momen politik dengan besarnya massa yang hadir dalam aksi tersebut.

Selain itu, bila kita merefleksikan bagaimana MA meminta maaf kepada BTP, setelah dijadikan calon wakil presiden karena telah mengeluarkan fatwa yang berakibat BTP dipenjara. Bila mana hal ini merupakan murni karena penistaan agama dan upaya membela Islam, maka tidak sepatutnya MA meminta maaf walaupun dijadikan calon wakil Presiden. Maka artinya adalah fatwa tersebut merupakan bentuk tekanan secara politik, bukan murni karena membela agama.

Untuk memperkuat bahwa terdapat kepentingan politik dalam aksi tersebut, kita dapat melihat dari hubungan antara FPI dengan PKS. Walaupun FPI nyatanya merasa bahwa mereka memanfaatkan partai politik untuk tujuan mereka, namun sebenarnya mereka juga dimanfaatkan oleh partai politik tersebut. Karena FPI membutuhkan penantang melawan BTP, sementara PKS membutuhkan dukungan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Artinya adalah ada hubungan saling membutuhkan dalam konteks melawan BTP. Bahkan hubungan ini

berlangsung sampai pemilu 2019, padahal antara FPI dan PKS memiliki perbedaan cara pandang tentang Islam.

Bila melihat dalam sisi ekonomi, maka bisa dipastikan ada motif ekonomi dari banyaknya ormas lokal dan besarnya massa yang bergabung dengan FPI melawan BTP. Hal ini karena kebijakan BTP mengenai penggusuran di Kampung Pulo, Bukit Duri, Pluit dan Kalijodo, menyebabkan kerugian bagi para penduduk sekitar. Maka ada alasan kuat untuk mereka yang telah menjadi korban BTP untuk menjatuhkan BTP. Khusus kepada dua tempat Kalijodo dan pasar Tanah Abang, kedua tempat tersebut adalah tempat perputaran uang yang besar. Kalijodo adalah salah satu lokasi prostitusi dan pengedaran narkoba terbesar di Jakarta yang dipimpin DA. Sementara pasar Tanah Abang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Tentu terdapat penguasa yang berkepentingan di sana, termaksud yang paling terkenal AL. Maka apabila tempat tersebut digusur, wajar muncul perlawanan dari para penguasa di sana. Sebagai contoh AL yang menjadi bagian dari jaringan FPI yang membantu proses pelaksanaan Aksi Bela Islam.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat banyak motif kepentingan dalam upaya untuk menjebloskan BTP ke penjara. Analisis gerakan sosial, dan mobilisasi sumber daya hanya sedikit bagian dari kerangka teoritis yang dapat membantu melihat proses berlangsungnya gerakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pisau analisis lain untuk melihat fenomena Aksi Bela Islam yang dilakukan oleh FPI pada tahun 2016 silam, mengingat orientasi gerakan ini yang memiliki ragam tujuan dan kepentingan.

Daftar Pustaka

- A. M. Mudhoffir, D. Y. (2017). Populisme Islam dan Tantangan. *Prisma vol 36*, 48-49.
- Abercrombie, H. &. (2016). Political Process. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 179). Malang: Intrans Publishing.
- Detik.com. (2014, November 11). *Surat Permintaan Pembubaran dan Babak Baru Perseteruan Ahok vs FPI*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/2744565/surat-permintaan-pembubaran-dan-babak-baru-perseteruan-ahok-vs-fpi>
- Edward, &. M. (2016). Sumber daya dan Mobilisasi sumber daya. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 168-172). Malang: Intrans Publishing.

- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 259-278.
- HarianIndoPROGRESS. (2018). *Aliansi Populis Islam yang Terfragmentasi*. Indoprogres.
- Indoprogres. (2016). Aksi Bela Islam: Antara Bela Agama dan Bela Oligarki. *Harian Indoprogres*, 1-6.
- kurnia, A. D. (2017). Aksi Bela Islam. Dalam I. S. Ahmad Doli Kurnia, *Aksi Bela Islam 212* (hal. 4). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Liputan6. (2017, Januari 31). *Sidang Ahok, Ketua MUI Sebut Keluarkan Fatwa karena Desakan*. Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/2842030/sidang-ahok-ketua-mui-sebut-keluarkan-fatwa-karena-desakan>
- Macionis. (2016). Gerakan Sosial. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan teori gerakan sosial* (hal. 4). Malang: Intrans publishing.
- Masithoh, D. (2018). PEMAKNAAN JIHAD BAGI ANGGOTA FPI RIAU DALAM AKSI SUPER DAMAI 212 DI JAKARTA. *JOM FISIP Vol. 5 NO. 1*, 1-13.
- Mayo, B. H. (2003). Demokrasi. Dalam M. Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (hal. 61). Jakarta: Gramedia.
- McAdam. (2016). Kekuatan Organisasi. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 180-181). Malang: Intrans Publishing.
- McAdam. (2016). Political Opportunities. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 193). Malang: Intrans Publishing.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.
- Morris, & S. (2016). Pemimpin dan kepemimpinan . Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 164-165). Malang: Intrans Publishing.
- Munajat. (2012). *FPI (ISLAMIC DEFENDERS' FRONT): THE MAKING OF A VIOLENT ISLAMIST MOVEMENT IN THE NEW DEMOCRACY OF INDONESIA*. Texas: Texas A&M University.
- Oberschall, A. (2016). Resources Mobilization Theory. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 155). Malang: Intrans Publishing.
- Perdana, DKK, A. (2018). *Kebangkitan Populisme Islam Di Indonesia*. Jakarta: Indoprogres.
- Republika. (2014, September 24). *Hari Ini, 6.000 Massa FPI Demo Tolak Ahok Jadi Gubernur*. Diambil kembali dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/09/24/ncdxgf-hari-ini-6-ribu-masa-fpi-demo-tolak-ahok-jadi-gubernur>
- Rizieq, S. (2008). *Risalah FPI: Amar Maruf Nahi Munkar*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.

- Salim, A. (2006). *Teori Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarohwati, S. (2017). *SIKAP MEDIA TERHADAP ISU POLITIK DAN AGAMA ISLAM (Analisis Framing Robert N. Entman Berita Ahok dan Q.S Al – Maidah Ayat 51 Pada Situs Berita Online Republika.co.id dan Metrotvnews.com Tanggal 7 Oktober – 4 Desember 2016)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Setyaningsih, T. (2017). *Wacana Pemberitaan Penista Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama dalam harian Republika*. Surakarta: UIN Surakarta.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru (Terj)*. Yogyakarta: Resist Book.
- Stake. (2015). Jenis studi kasus. Dalam Creswell, *penelitian kualitatif & Desain Riset* (hal. 137-139). Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko. (2016). Gerakan Sosial. Dalam O. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 6). Malang: Intrans Publishing.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sukmana, O. (2016). Proses Politik. Dalam O. Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (hal. 191). Malang: intrans Publishing.
- Suryabrata. (1998). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Tempo. (2017, April 4). *Ahok Ungkap Kenapa Sebut Al Maidah 51 di Pidato Kepulauan Seribu*. Diambil kembali dari Tempo.Co: <https://metro.tempo.co/read/862661/ahok-ungkap-kenapa-sebut-al-maidah-51-di-pidato-kepulauan-seribu/full&view=ok>
- Woodward, M., & Nurish, A. (2016). Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam. *Maarif Institute*, 107-122.
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo persada.